



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526772/2018**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
4. Kode>Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG
- Sebesar : Rp. 52.400.000 (LIMA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
005.05.09.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 52.400.000
Rp. 52.400.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	52.400.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 52.400.000

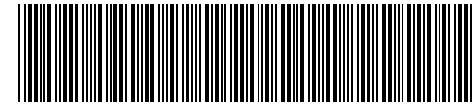
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2018
IA. INFORMASI KINERJA



DS:2325-3847-2096-7042

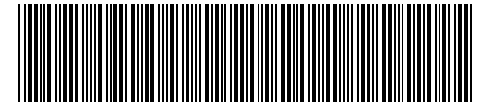
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : SRI MULIATI,S.Sos.,MH.
Bendahara Pengeluaran : LISA LUSIANA FARIDA, SH
Pejabat Penanda Tangan SPM : ARIYANTO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		52.400.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		52.400.000
2 Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)		52.400.000
Sasaran Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara		
Indikator Kinerja Program	01	Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan Tepat Waktu	3579 Perkara	
	02	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	2261 Perkara	
	03	Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	30 Perkara	
	04	Masyarakat Penerima Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara	5760 Jam Layanan	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara		
Indikator Output Program	01	Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer Termasuk Penyelesaian Perkara Yang Kurang dari 5 (lima) bulan	3579 Perkara	
	02	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	2702 Perkara	
	03	Perkara Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	30 Perkara	
	04	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	5760 Jam Layanan	
Kegiatan	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		52.400.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN		
	02	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN		
	03	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara		
	04	Tenaga Teknis yang kompeten di Bidang Hukum dan Administrasi d Lingkungan Peradilan TUN		
Output Kegiatan	1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	95,00 Perkara	20.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	2644 Perkara	
Output Kegiatan	1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikam Melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,00 Perkara	600.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Prodeo	34 Perkara	
Output Kegiatan	1059.003	Pos Bantuan Hukum	288,00 Jam Layanan	31.800.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN	8064 Jam Layanan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2018
IA. INFORMASI KINERJA



DS:2325-3847-2096-7042

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : SRI MULIATI, S.Sos., MH.
Bendahara Pengeluaran : LISA LUSIANA FARIDA, SH
Pejabat Penanda Tangan SPM : ARIYANTO

Halaman : IA.2

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
NRP 30395

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2018
I B. SUMBER DANA



Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	52.400.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	52.400.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2325-3847-2096-7042

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526772	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	-	52.400	-	-	-	52.400		
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	-	52.400	-	-	-	52.400		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	52.400	-	-	-	52.400		
1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	-	20.000	-	-	-	20.000	19 . 51	
01	RM	-	20.000	-	-	-	20.000	136	
1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	600	-	-	-	600	19 . 51	
01	RM	-	600	-	-	-	600	136	
1059.003	Pos Bantuan Hukum	-	31.800	-	-	-	31.800	19 . 51	
01	RM	-	31.800	-	-	-	31.800	136	
JUMLAH		-	52.400	-	-	-	52.400		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
NRP 30395

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2325-3847-2096-7042

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

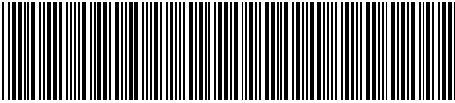
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526772	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	482	1.069	1.876	2.872	3.018	3.354	5.822	5.664	6.141	6.267	7.016	8.819	52.400
		52 BELANJA BARANG	482	1.069	1.876	2.872	3.018	3.354	5.822	5.664	6.141	6.267	7.016	8.819	52.400
	005.05.09.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	482	1.069	1.876	2.872	3.018	3.354	5.822	5.664	6.141	6.267	7.016	8.819	52.400
		52 BELANJA BARANG	482	1.069	1.876	2.872	3.018	3.354	5.822	5.664	6.141	6.267	7.016	8.819	52.400
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.274	15.310
		- PNBP (425232)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		- PNBP (425233)	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	999	12.010
		- PNBP (425239)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
NRP 30395

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2018
IV A. B L O K I R



DS:2325-3847-2096-7042

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [526772] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

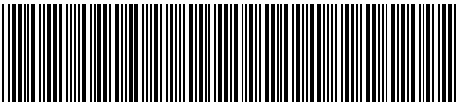
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
NRP 30395

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2018
IV B. C A T A T A N



DS:2325-3847-2096-7042

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [526772] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
NRP 30395